

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH

(*Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung*)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Unviversitas Mahaputra Muhammad Yamin*



OLEH : ISRAMIRATHUL

WAHYU NPM :

181000462201001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

2022

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris Pada Kabupaten Sijunjung)

ISRAMIRATHUL WAHYU

181000462201001

Pembimbing 1 : Dr. SISKI YULIA DEFITRI, SE, M.Si

Pembimbing 2 : Hj. NIDIA ANGGRENI DAS, SE.,MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi empiris pada Kabupaten Sijunjung). Sedangkan sampel penelitian adalah Kepala, Bendahara, dan Staff Keuangan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Sijunjung yang berjumlah 81 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik sampel yang digunakan adalah total sampling dengan cara menyebar kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (X1) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$. sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$. Setelah itu, Sistem Informasi Akuntansi (X1) dan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi (X1), Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Kualitas Laporan Keuangan (Y)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang ditujukan pada daerah kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara efisien, efektif, ekonomis serta dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang akurat. Laporan Keuangan merupakan media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan tersebut dapat dibandingkan.

Salah satu inovasi terbaru yang dilakukan pemerintah yaitu menteri keuangan bertujuan untuk mengetahui sekaligus memantau pelaporan keuangan, yaitu dengan mengeluarkan sistem pelaporan keuangan menggunakan serangkaian pedoman melalui proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan laporan akhir keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan dalam pelaksanaan APBD. Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja, dan alat kontrol dalam mengelola keuangan. Untuk mengoptimalkan kualitas laporan keuangan

daerah, saat ini sistem teknologi informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Akuntansi.

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi berguna untuk memberi pertimbangan atas kebijakan yang diambil, memberikan informasi sebagai penetapan pajak, sebagai sistem pengendalian sektor publik, memberikan informasi akurat dan dapat dipercaya, serta dijadikan pedoman dimasa yang akan datang. Salah satu pengguna sistem informasi akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. sistem informasi akuntansi dikatakan baik jika relevan terhadap kebutuhan penggunanya, maka dari itu semakin baik sistem informasi akuntansi suatu pemerintah maka semakin bagus kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Inpres Nomor 4 tahun 2011, BPKP dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (DBPPKD), memandang perlu memfasilitasi pemerintahan daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku *efisien, ekonomic, efective, transparans, akuntabel, dan auditebel*. Maka dari itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk pemerintah daerah. sistem ini merupakan aplikasi terpadu yang di gunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk

meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Dengan demikian, pemerintahan daerah yang merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar, transparan, dan akuntabel.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mana standar ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Standar akuntansi ini digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta dibutuhkan dalam transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 23, bahwa bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka pemerintah harus menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yang telah diterima secara umum dan memenuhi prinsip tepat waktu. Standar akuntansi pemerintahan ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Kriteria untuk menilai Kualitas Laporan Keuangan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Fenomena dalam penelitian ini yaitu, Pemerintahan Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan dengan baik Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangannya beberapa tahun terakhir ini. Hasil evaluasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat, menyatakan Kabupaten sijunjung telah menerima opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berturut-turut sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan diketahui juga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Pada dasarnya Sistem Informasi Akuntansi diterapkan untuk mengelola semua transaksi keuangan, aset kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dan juga bermutu. Jika pemerintah daerah dapat memanfaatkan sistem informasi akuntansi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik yang secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Sari et al., 2014; Tawaqal & Suparno, 2017; Untary & Ardiyanto, 2015) bahwa sistem informasi akuntansi sangat berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Diani, 2014; Yanti et al., 2020) mendapatkan hasil bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain sistem informasi akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan laporan keuangan bertujuan agar terciptanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yaitu dengan menyesuaikan laporan keuangan yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah, dalam laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan dan menggunakan prinsip-prinsip dari standar akuntansi yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Jika prinsip-prinsip SAP ini digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dengan baik dan benar secara keseluruhan, maka hal ini sangat berpengaruh baik untuk mutu dan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan suatu pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Adhi & Suhardjo, 2013; Pujanira & Taman, 2017; Rahmawati et al., 2018) dengan hasil standar akuntansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Habibie (2021) menyatakan bahwa standar akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin & Ananthi (2019) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin & Ananthy (2019) terletak pada objek penelitian Suprihatin & Ananthy (2019) adalah Pemerintah Daerah Kota Serang sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan hasil uraian diatas, dalam latar belakang permasalahan dan hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Sijunjung).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Bagaimana pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah semoga bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan diantaranya :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk dapat memahami dengan mudah, penelitian ini memformulasikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori pendukung, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi jenis penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengkaji tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Dalam pembahasan ini melingkup tentang gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, uji instrumen data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta berisikan saran baik untuk peneliti selanjutnya ataupun untuk tempat penelitian dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat pada hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang pengaruh sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sijunjung maka disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu Sistem Informasi Akuntansi (X1) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 35,964 > t_{tabel} = 1,666$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi yang di terapkan maka hal itu juga akan berdampak baik terhadap kualitas laporan keuangan. Begitupun sebaliknya, apabila penerapan sistem informasi akuntansi buruk maka akan berpengaruh buruk juga terhadap kualitas laporan keuangan yang di hasilkan daerahnya.
2. Hipotesis kedua (H2) diterima, yaitu Sistem Informasi Akuntansi (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 4,489 > t_{tabel} = 1,666$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap laporan keuangan yang dihasilkan dengan syarat dan ketentuan berlaku yaitu dengan menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang

dihasilkannya. Namun juga sebaliknya, jika laporan keuangannya tidak mengikuti syarat dan ketentuan berlaku maka laporan keuangan yang dihasilkannya juga kurang baik dan jauh dari kata berkualitas.

3. Hipotesis ketiga (H3) diterima, yaitu Sistem Informasi Akuntansi (X1) dan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai

$901,297 > 2,35$ dengan nilai signifikannya $0,000 < 0,005$.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah sama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sijunjung.



5.2 Saran

1. Sistem Informasi Akuntansi pada OPD Pemerintah Kabupaten Sijunjung dinilai sangat baik, tetapi tidak menutup kemungkinan pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga pemerintah daerah hendaknya menata kembali perangkat sistem informasi akuntansi yang didukung oleh sumber daya yang memadai. Menambah atau meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia mengenai sistem yang diterapkan, melalui pelatihan, kursus atau penataran khusus bidang komputer akuntansi.
2. Untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sebaiknya pemerintah memperhatikan para pegawai sehingga dapat memiliki pemahaman, kompetensi, dan integritas yang tinggi terhadap sistem atau standar yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang nomor 71 tahun 2010 mengenai SAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93–111.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman).
- Gamayuni, R. R. (2018). Basis Akrua Basis Akrua.
- Habibie, Mochammad, Y., & Yohana. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang (Studi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang). <http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/652/>
- Jultri, A., & Made, A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2019). S a P 2019.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif (p. 18).
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, VI, 14–28.

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap KUALITAS Laporan Keuangan SKPD Kota Tanggerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.

Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 09(05), 43–51.

Sari, N. P. Y. M. M., Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–12.

Sekaran, U. (2013). Edisi 5, *Research Method For Business: A skill Building Approach*. Jhon Wiley@Spsn. New York.

Sofia, I. P. (2015). Modul Sistem Informasi Akuntansi (Sistem Pemrosesan Transaksi). In Universitas Pembangunan Jaya.

Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242–253.

Tawaqal, I., & Suparno. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 125–135.

Triyani, Z., & Tubarat, C. P. T. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN(JAK)*, 23(1), 11–30.

Untary, N. R., & Ardiyanto, M. D. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang). *DiponegoroJournal of Accounting*, 4(2), 1–12.

Yanti, N. S., Made, A., & S, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–8.